

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Zulham

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera

Utara Medan

drzulham@uinsu.ac.id

Abstrak

Kata Kunci: Alquran mencakup berbagai macam jenis ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari manusia, tidak terkecuali ilmu tentang pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan sistem keuangan pendidikan Islam pada masa kejayaannya tercermin pada pengelolaan waqaf, dengan kata lain, pembiayaan pendidikan Islam pada waktu itu maju pesat disebabkan karena adanya dana waqaf yang dialirkan untuk kepentingan pendidikan. Sistem keuangan pendidikan Islam berbeda dengan system keuangan umum lainnya, hal yang paling membedakannya adalah adanya pertanggungjawaban terhadap Allah Swt dalam proses evaluasi keuangan. Dalam system pengelolaan keuangan pendidikan Islam terdapat pula tahap pendistribusian. Islam mengajarkan beberapa prinsip dalam mendistribusikan keuangan pendidikan yaitu : 1) tidak adanya transaksi keuangan pendidikan yang berbasis bunga, 2). Penghindaran aktifitas keuangan pendidikan yang melibatkan *maysir*(judi), 3). Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, 4). Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam. Setelah tahap pendistribusian maka tahap selanjutnya adalah tahap pengelolaan keuangan pendidikan Islam di antaranya : 1). Perencanaan (*planning*), 2). Pengorganisasian (*organizing*), 3). Personalia (*staffing*), 4). Pengkoordinasian (*coordinating*), 5). Pengelolaan (*actuating*), 6). Evaluasi (*auditing*). Semua bentuk tahap system pengelolaan keuangan pendidikan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan system pengelolaan keuangan pendidikan yang juga digunakan oleh system keuangan-keuangan lainnya yang non Islami akan tetapi dalam Islam lebih diutamakan nilai-nilai Islami dan lebih mengutamakan pertanggungjawaban akhirat dibandingkan dengan dunia.

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan Islam sebagai suatu organisasi pendidikan yang mengelola pendidikan Islam merupakan wadah bagi orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membentuk manusia sempurna (*insan kamil*). Setiap kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam sebagai ujung dari kegiatan akhir. Pada masa kejayaan Islam, Madrasah Nizhamiyah, al-Azhar dan lain sebagainya, merupakan lembaga pendidikan Islam yang cukup sukses di zamannya. Secara tidak langsung yang mengakibatkan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut maju adalah factor sistem financial pendidikannya yang sangat baik, sehingga lembaga pendidikan tersebut mampu mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas handal dan mampu memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan peradaban dunia.

Pengelolaan sistem financial pendidikan Islam pada masa kejayaannya tercermin pada pengelolaan waqaf, dengan kata lain, pembiayaan pendidikan Islam pada waktu itu maju pesat disebabkan karena adanya dana waqaf yang dialirkan untuk kepentingan pendidikan. Dalam sistem pendidikan Islam klasik, antara pendidikan dan waqaf memiliki hubungan yang sangat erat. Waqaf sebagai suatu lembaga merupakan sumber keuangan bagi pendidikan, pada masa ini banyak sekali wakaf-wakaf yang diserahkan, seperti tanah-tanah pertanian, toko-toko, kantor-kantor, perpustakaan, dan sarana-sarana publik lainnya seperti rumah sakit, masjid, dan jembatan.

Harta-harta wakaf biasanya diserahkan secara tertulis dalam bentuk dokumen dengan didampingi oleh saksi. Dokumen tersebut menggambarkan materi kekayaan yang menjadi wakaf dan menerangkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola harta wakaf serta untuk apa uang hasil wakaf atau benda wakaf dimanfaatkan. Selain itu dalam dokumen juga dijelaskan siapa yang akan mengawasi dan mengelola harta wakaf.¹ Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian Negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas social dan ekonomi masyarakat. Lembaga pendidikan yang tidak mengelola sistem keuangannya dengan baik dan tepat guna, maka akan mengalami kemunduran dan bahkan sampai kepada gulung tikar atau dengan kata lain lembaga pendidikan tersebut bisa tutup dan tidak menerima murid lagi. Sistem pengelolaan keuangan yang tidak baik bukan saja akan menyebabkan kemunduran akan tetapi juga akan memberikan peluang kepada para pelaku pendidikan untuk melakukan penggelapan dana (korupsi), atau juga bisa menyebabkan pembangunan-pembangunan atau penggunaan dana yang tidak tepat sasaran, sehingga dana yang telah digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan itu sendiri.

¹Raghib as-Sirjani, *Rawa' iul Auqaf* (Mesir : Nahdetmisr, 2010), h.11

Sebenarnya selain dari pengelolaan sistem yang harus sistematis, maka yang paling penting adalah pembentukan pribadi-pribadi para pengelola sistem financial pendidikan, jika anggota dalam satu elemen sistem tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan anggota elemen sistem lainnya maka program yang direncanakan tidak akan berjalan dengan baik, atau anggota sistem tidak tahu tugas pokok dan fungsinya masing-masing ini juga akan menghambat kerja suatu sistem. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang berdiri dengan dana wakaf, atau atas nama Yayasan, yang akhirnya hancur dan mengalami kemunduran disebabkan karena kepribadian para pengurusnya yang tidak profesional, yang hanya mementingkan diri sendiri. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan masih banyak sistem keuangan yang kurang transparan sehingga terjadi kasus penyimpangan dana, seperti hasil dari Audit BPK terhadap Depdiknas/Kementrian Pendidikan Nasional sampai semester II tahun 2007 terlihat bahwa penyimpangan pengelolaan aset tanpa bukti pertanggungjawaban dan pemborosan.

Daftar penyelewengan tersebut terjadi buruknya pengelolaan dana di Depdiknas yang diikuti juga buruk dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.² Untuk menghindari hal ini terjadi maka dibutuhkan satu disiplin ilmu atau penelitian yang mengkaji tentang pentingnya sistem keuangan pendidikan Islam yang lebih mementingkan kepentingan umat. Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia tentang bagaimana mengelola keuangan yang benar. Ini dilakukan agar semua proses sistem keuangan pendidikan dapat dilaksanakan dengan tepat guna dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak penting sama sekali.

DISTRIBUSI KEUANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab wilayah pemerintahan Islam telah meliputi Irak, Iran, Syiria dan Mesir. Pendapatan yang diperoleh pemerintah di Madinah dalam bentuk *Ghanimah*, *Jizyah*, *Kharaj* dan Lainnya sangat melimpah. Pada saat yang sama beban organisasi tentara, pengaturan tanah-tanah yang ditaklukkan beserta penanggungan kesejahteraan umat mengharuskan keuangan Negara dikelola secara sistematis. Karena itu sejak pemerintahan Umar dana perolehan pemerintah tidak lagi habis dibagi melainkan disimpan disatu tempat yang aman sebagai lembaga perbendaharaan Negara (*Baitul Mal*).³

Bagaimanakah cara mendistribusikan pembiayaan pendidikan Islam. Alquran mengajarkan beberapa prinsip dalam mengelola dan mendistribusikan

² <http://www.google.co.id/amp/s/amp.kasus.co.id/thread/52b256149ca171c378b4683/contoh-kasus-suap-di-lembaga-pendidikan>. (diakses 29 November 2018, pukul 11.30 Wib).

³ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab, Terjemahan* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), h. 185.

dana pendidikan Islam. Berikut beberapa prinsip dalam mengelola keuangan pendidikan yaitu :

- a) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).
- b) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi), *gharar* (transaksi yang tidak jelas).⁴
- c) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah.
- d) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam.

Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan terkait dengan masalah bagaimana mencari dana (sumber dana), bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja dan merencanakannya untuk kebutuhan masa yang akan datang. Sementara biaya pendidikan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik berupa uang maupun non moneter. Biaya tersebut memerlukan pengelolaan yang jelas.⁵ Dalam Islam, pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Ringkasnya, dalam Islam, pendidikan disediakan secara gratis oleh negara. Ijma' sahabat juga telah menunjukkan kewajiban negara menjamin pembiayaan pendidikan.⁶

Khalifah Umar dan Utsman memberikan gaji kepada para guru, muadzin, dan imam sholat jama'ah. Khalifah Umar memberikan gaji tersebut dari pendapatan Negara (*Baitul Mal*) yang berasal dari *jizyah*, *kharaj* (pajak tanah), dan *usyur* (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara). Pola pengelolaan sistem keuangan pendidikan yang gratis ini cukup terlihat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan melakukan beberapa kebijakan dalam pemerintahannya yaitu :⁷

- 1) Pengangkatan Khalifah pada dirinya tidak langsung diterima begitu saja, akan tetapi di musyawarahkan dan ditawarkan kembali kepada rakyat nya untuk memilih kembali khalifah yang disukai dan ternyata rakyat nya tetap menyetujui Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah.
- 2) Mengembalikan semua harta milik yang telah diwarisinya dengan cara yang tidak sah menurut syariat islam ke dalam Baitul Mal.

⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan cet 2* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), h. 16.

⁵ Yahya, *Sistem Pembiayaan Pendidikan : Suatu Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Sumatera Barat*. Disertasi, Bandung Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2003), h. 43-44.

⁶ Shiddiq al-Jawi, *Pembiayaan Pendidikan Dalam Islam*, Jurnal House of Khilafah, 2007. H. 1.

⁷ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab (As-Siyasah Al-Maliyah Li 'Umar bin Khaththab)*, Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 68.

- 3) Meninggalkan kemewahan dan berpola hidup sederhana, yakni dengan hanya mengambil gajinya sebanyak 400 dinar setahun dari 40.000 dinar.
- 4) Dalam memimpin Negara kepentingan agama di utamakan dari pada politik atau jabatan.
- 5) Bertindak adil dengan memecat para pejabat dan petugas yang zalim dan menunjuk orang yang adil dan menghapus pajak-pajak yang tidak sah yang dulu di berlakukan oleh Bani Umayyah.

TAHAP PENGELOLAAN SISTEM FINANSIAL PENDIDIKAN ISLAM

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam upaya mengembangkan proses dan tujuan dari suatu sistem, dengan adanya rencana maka ia akan memudahkan tercapainya beberapa hal yaitu : (1) organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. (2) para anggota organisasi dapat melakukan kegiatan secara konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih. dan (3) kemajuan dapat dipantau dan diukur, sehingga tindakan korektif bisa ditempuh bila tingkat kemajuan belum memenuhi target yang diinginkan.⁸

Maka dari itu perencanaan (*planning*) dapat diartikan dengan : (1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, dan (2) penentuan strategi, (3) kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, serta (4) standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.⁹ Menurut Juliansyah Noor, perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang telah ditentukan. Perencanaan menjadi fungsi pertama karena dia merupakan dasar dan titik tolak dari kegiatan pelaksanaan selanjutnya.¹⁰ Adapun ayat Alquran yang berkaitan dengan perencanaan dijelaskan Allah Swt dalam Alquran.¹¹

﴿تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَتَقُوا الْغَدِقْدَمَتَ مَا نَفْسٌ وَلْتَنْظُرِ اللَّهُ اتَّقُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتُوا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap individu memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk masa depan, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan.

⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi II (Yogyakarta : BPFE, 2011), h. 23.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen, Tinjauan Filosofis dan Praktis* (Jakarta : Kencana, 2013), h. 123.

¹¹ Q.S. Al-Hasyr/59: 18.

Tafsir al-Maraghi menjelaskan lafadz “*Ma qaddamat*” (apa yang telah dilakukan), “*Ghad*” (hari kiamat), dinamakan *ghad* (besok hari) karena dekatnya, sebab segala yang akan datang (terjadi) adalah dekat sebagaimana dikatakan *sesungguhnya besok hari itu bagi orang yang menanti adalah dekat*. Secara tidak langsung ayat ini memberikan penjelasan kepada orang-orang yang beriman akan memperhatikan masa depannya atau hari esok yang akan ia lalui, maka dari itu ia harus memiliki bekal untuk hari esok, untuk memperoleh suatu bekal maka ia harus memiliki rencana yang matang, agar bekal ia yang ia persiapkan sempurna dan tidak kurang sesuatu apapun. Dalam perjalanan suatu sistem, pemikiran masa depan yang dituangkan dalam konsep yang jelas dan sistematis disebut dengan istilah perencanaan atau *planning*.¹²

Kata-kata ‘*ghad*’ sendiri dalam bahasa Arab berarti “besok”. Beberapa pakar tafsir (*mufassir*) menyatakan dalam beberapa riwayat : Allah “senantiasa mendekatkan hari kiamat hingga menjadikannya seakan terjadi besok, dan ‘besok’ adalah hari kiamat”. Ada juga yang mengartikan ‘*ghad*’ sesuai dengan makna aslinya, yakni besok. Hal ini bisa diartikan juga bahwa manusia diperintahkan untuk selalu melakukan koreksi dan perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik. Dalam kitab *Tafsîr Ibnu Katsîr*, ayat ini disamakan dengan perkataan *hâsibû anfusakum qablaan tuhâsibû* (koreksilah dirimu sebelum nanti kamu dihisab di hari akhir). *Wattaqûllâh* (dan bertaqwalah kepada Allah). Kalimat kedua (*wattaqllâh*) sama dengan pernyataan Allah dalam kalimat pertama ayat ini. Perintah bertaqwa disebutkan dua kali sebagai sebuah bentuk penekanan. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya ketaqwaan kepada Allah.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian yaitu pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang strategis. Pemanfaatan sumber daya bisa digambarkan melalui pembagian kerja organisasi menjadi sejumlah departemen dan jabatan, garis formal kewenangan, dan mekanisme untuk mengoordinasi tugas yang berbeda.¹³ Dalam hal ini Alquran menganjurkan prinsip pembagian kerja berdasarkan kedudukan dan fungsi (tupoksi) dalam Alquran.¹⁴

لِمُونَ يُفْلِحُ لِأِنَّهُ دَارُ عَقِيبَةٍ لَهُ تَكُونُ مَنْ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ عَامِلٌ إِنِّي مَكَانَتِكُمْ عَلَى أَعْمَلُوايَقَوْمٍ قُلْ

الظَّ

Artinya : “Katakanlah, ‘hai kaumku, berbuatlah berdasarkan kedudukan kalian, sesungguhnya aku pun berbuat (demikian). Kelak kalian akan mengetahui, siapa

¹² Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Surabaya : Erlangga, 2007), h. 30.

¹³ Richard L. Daft, *op.cit.*, h.12.

¹⁴ Q.S. Al-An’am/6: 135.

yang akan memperoleh tempat (terbaik) di perjalanan (nanti). Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan sukses.”

Menurut *Tafsir Alquran Tematik* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, melalui ayat ini Allah Swt menyuruh nabi Muhammad Saw untuk mengajak dan memerintahkan umatnya agar bekerja sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya. Sebab, pekerjaan yang harus dikerjakan oleh setiap orang tentu tidak sama, tetapi sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing.¹⁵

Untuk mencapai tujuan dari kerja pengorganisasian dari suatu sistem, hal yang paling penting untuk dipersiapkan adalah pembagian kerja. Menurut Winardi untuk memenuhi hal ini digunakan skalar proses (*scalar process*), ilustrasi yang dipakai yaitu sebuah segitiga kecil merupakan bidang pekerjaan yang harus digarap oleh suatu sistem. Untuk membentuk kelompok pekerja yang terkoordinasi dan efektif, kepala departemen/pemimpin dari suatu sistem khususnya sistem financial pendidikan Islam perlu membagi-bagi pekerjaan dalam tingkat (*level*) dan fungsi (*function*), kemudian mempekerjakan orang dan sumber daya yang ada.¹⁶

Dalam suatu sistem manajemen financial pendidikan keteraturan dalam pengorganisasian dapat diwujudkan melalui 5 pendekatan yaitu : (1) pendekatan fungsional vertikal, yaitu pengelompokan karyawan pada departemen menurut keahlian dan pekerjaan yang sama. (2) pendekatan divisional, yaitu pengelompokan karyawan ke dalam divisi yang berbeda dan tersendiri berdasarkan produk, program, atau daerah geografis yang sama. (3) pendekatan matriks, yakni implementasi rantai komando fungsional dan divisional secara terus-menerus dan saling melengkapi satu sama lain di departemen yang sama. (4) pendekatan berdasarkan tim, yaitu pembentukan tim untuk melakukan tugas tertentu dan berkoordinasi dengan departemen utama. (5) pendekatan jaringan, yaitu penghubungan antar organisasi yang berada pada jarak yang berjauhan melalui internet.¹⁷

3. Personalia (*staffing*)

Penyusunan personalia merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan seluruh anggota organisasi. Fungsi ini dilaksanakan dalam dua tipe lingkungan yang berbeda. *Pertama*, lingkungan eksternal yang meliputi seluruh faktor di luar organisasi yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhinya. *Kedua*, lingkungan internal yang terdiri dari unsur-unsur di dalam organisasi.¹⁸ Menurut

¹⁵ Muchlis M. Hanafi, *et. al.*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Kerja dan Ketenagakerjaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta : Penerbit Aku Bisa, 2012), h. 18-19.

¹⁶ J. Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Cet Ke-2 (Jakarta : Kencana, 2007), h. 99.

¹⁷ Richard L. Daft, *op.cit.*, 2006, h. 15

¹⁸ T. Hani Handoko, *op.cit.*, 2011, h. 233.

Handoko ada 8 langkah dalam yang harus ditempuh dalam proses *staffing* yaitu : (1) perencanaan sumber daya manusia. (2) penerarikan. (3) seleksi. (4) pengenalan dan orientasi. (5) latihan dan pengembangan. (6) penilaian atas pelaksanaan kerja. (7) pemberian balas jasa dan penghargaan. (8) perencanaan dan pengembangan karir.

Langkah paling awal dalam menyusun personalia yang baik adalah dengan menentukan deskripsi dan spesifikasi jabatan yang nantinya diisi oleh karyawan yang akan direkrut. Setelah deskripsi dan spesifikasi jabatan dirumuskan dengan baik, maka langkah selanjutnya ialah melakukan perekrutan karyawan (*recruitment*). Salah satu cara rekrutmen yang bisa diterapkan yaitu dengan memberikan penawaran secara umum/terbuka kepada siapa saja yang berniat mengikuti seleksi masuk menjadi karyawan, tanpa adanya deskriminasi dari pihak pimpinan. Ayat Alquran yang menjadi dasar pentingnya *staffing* atau rekrutment karyawan dalam suatu sistem keuangan pendidikan adalah.¹⁹

﴿الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَجَرْتُ مِنْ خَيْرِ ابْنٍ اسْتَجَرْتُهُ يَأْتِي أَحَدَهُمَا قَالَتْ﴾

Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

4. Pengkoordinasian (*coordinating*)

Menurut Gitosudarmo dan Mulyono, koordinasi adalah usaha untuk mengharmoniskan atau menyerasikan semua kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan terciptanya koordinasi kerja, maka beban-bebanantar bagian organisasi akan menjadi seimbang.²⁰

Pendekatan koordinasi yang efektif.²¹

1. Teknik manajemen dasar	2. Peningkatan koordinasi potensial.	3. Pengurangan kebutuhan akan koordinasi.
<ul style="list-style-type: none"> • Aturan dan prosedur. • Hierarki manajerial. • Penerapan tujuan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan system informasi vertical. • Penciptaan hubungan horizontal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan sumber daya tambahan. • Penciptaan tugas-tugas yang dapat

¹⁹Q.S. As-Shaff/28: 26.

²⁰ Indriyo Gitosudarmo dan Agus Mulyono, *Prinsip Dasar Manajemen*, Edisi Ketiga, Cet.V (Yogyakarta : BPFE, 2009), h. 145.

²¹ Indriyo Gitosudarmo dan Agus Mulyono, *op.cit.*, hlm. 147

rencana.

berdiri sendiri.

Praktik pengendalian dan koordinasi secara terpusat ini bisa ditemukan dalam Alquran.²²

لَا وَهُمْ وَجُنُودُهُ سُليْمٰنُ مِحْطَمٰنِكُمْ لَا مَسْكِنَتَكُمْ اَدْخُلُوا النَّمْلُ يَتَأَيُّهَا نَمْلَةٌ قَالَتْ النَّمْلُ وَاِدْعَالِي اَتُوْا اِذَا حَتَّى

يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah ratu semut, “Hai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya, sedangkan mereka tidak menyadari.”

Agus Purwanto dalam *Nalar Ayat-ayat Semesta* memberikan penjelasan yang cukup logis mengenai ayat di atas. Menurut ilmu pengetahuan terkini, diketahui bahwa komunitas semut dipimpin oleh ratu semut. Karena itu, *ta`ta`nits* pada kata “*namlah*” memang mengindikasikan bahwa semut itu adalah betina. Semut betina ini yang memiliki kedudukan tertinggi dalam memberikan komando dan melakukan koordinasi kepada para semut pekerja. Menurut Agus, dibutuhkan terjemahan baru pada ayat tersebut, yang semula “seekor semut” diganti “ratu semut”.²³

Pada konteks sistem manajemen, ayat di atas menunjukkan adanya rantai komando dalam organisasi. Pucuk pimpinan dapat memberikan instruksi pada seluruh bawahannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan organisasi dan perusahaan.

5. Tindakan/pengelolaan (*actuating*)

Actuating berarti mengelola lingkungan organisasi yang melibatkan lingkungan dan orang lain, dengan tata cara yang baik. Proses *actuating* adalah memberikan perintah, petunjuk, pedoman dan nasehat serta keterampilan dalam berkomunikasi. Dalam melaksanakan *actuating* keterampilan yang paling dibutuhkan adalah keterampilan berkomunikasi. Apabila dalam suatu sistem ditempatkan orang-orang yang sangat berkompeten dalam berkomunikasi maka hal ini akan sangat memudahkan proses *actuating*. Hal yang terpenting dari proses ini adalah harus menentukan prinsip-prinsip efisiensi, komunikasi yang baik dan prinsip menjawab pertanyaan. *Actuating* atau tindakan berkomunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi yang dijalankan atau terjadi dalam suatu sistem keuangan pendidikan.

6. Evaluasi (*controlling*)

²²Q.S. An-Naml/27: 18.

²³ Agus Purwanto, *Nalar Ayat-ayat Semesta*, Cet. 1 (Bandung : Mizan, 2012), h. 78.

Secara harfiah evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*. *Evaluation* akar katanya adalah *value* yang berarti nilai atau harga.²⁴ dapat diartikan sebagai bentuk penilaian dari sebuah tindakan atau proses segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pendidikan. Dalam bahasa Arab evaluasi dikenal dengan istilah *imtihan* yang berarti ujian, dan dikenal juga dalam bahasa Arab dengan *al-Qimah* atau *al-Taqdi* yaitu nilai.²⁵

Secara istilah evaluasi berarti : (1) perkiraan kenyataan atau dasar ukuran nilai tertentu dan dalam rangka situasi yang khusus dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. (2) suatu prosedur dalam suatu studi yang tujuan utamanya adalah evaluasi semata-mata dan lazimnya meliputi penemuan fakta-fakta tertentu melalui observasi yang menyangkut keterangan-keterangan seksama dari aspek-aspek yang harus dinilai serta tingkat istilah yang harus dipergunakan dalam menyusun kesimpulan-kesimpulan.²⁶

Adapun ayat Alquran yang menjelaskan tentang evaluasi adalah.²⁷

عَتِيدُ رَقِيبٌ لَدَيْهِ إِلَّا قَوْلٌ مِّنْ يَلْفِظُ مَا ۖ فَعِيدُ الشِّمَالِ وَعَنِ الْيَمِينِ عَنِ الْمُتَلَقِّيَانِ يَتَلَقَىٰ ۚ

Artinya : yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri, tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini berkata : bahwa apabila bertemu kedua malaikat, pencatat amal manusia, maka mereka akan selalu memantau tanpa kesalahan sedikitpun. Oleh karena itu wahai anak-anak adam, terserah kepadamu, apakah kamu mau memperkecil dan atau memperbesar amal atau perbuatan jahatmu. Kamu diberi kebebasan dan bertanggung jawab terhadapnya dan nanti setelah mati, daftar itu ditutup dan digantungkan pada lehermu masuk bersama-sama engkau ke dalam kubur sampai kamu dibangkitkan pada hari kiamat.

Apakah hubungan antara ayat yang diungkapkan di atas dengan system evaluasi dalam financial pendidikan Islam?, jawabannya adalah evaluasi merupakan suatu kegiatan kilas balik dari semua program yang telah dilaksanakan, agar pelaksanaan program berjalan dengan baik, dan seluruh komponen sistem dapat mengetahui hasil kinerja dari sistem yang telah ada. Maka dari itu seluruh

²⁴John Echol, M. Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, h. 220.

²⁵Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2005), h. 183.

²⁶Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan* (Jakarta : Gunung Agung Cet ke 3, 1982), h. 99.

²⁷Q.S. Qaf/50: 17-18.

pelaksana sistem dituntut untuk jujur dan terbuka serta menyadari bahwa seluruh perbuatannya akan ada yang mengawasi dan mencatatnya tanpa silap sekalipun.

بِرَّهٖ شَرَّادْرَءٍ مِّثْقَالِ يَعْـمَلْ وَمَنْ ۖ بِرَّهٖ خَيْرٌ اَدْرَءٍ مِّثْقَالِ يَعْـمَلْ فَمَنْ

Artinya: Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dharrah niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dharrah sekalipun, niscaya dia akan melihatnya pula.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, seluruh komponen sistem dan orang-orang yang terlibat di dalamnya harus menyadari bahwa semua peraturan dan kebijakan dalam suatu system diciptakan dan dirancang untuk diberlakukan ke semuanya tanpa ada pengecualian, karena kebaikan dan keburukan atau dengan kata lain dalam suatu sistem financial maka berarti kecurangan sekecil apapun tetap akan ada pengawasannya. Kata (بَرَّهٖ) terambil dari kata (رَأَى) yang pada mulanya berarti *melihat dengan mata kepala*. Tetapi ia digunakan juga dalam arti *mengetahui*. Sementara ulama menjelaskan bahwa jika anda ingin memahaminya dalam arti *melihat dengan mata kepala* maka yang terlihat itu adalah tingkat-tingkat dan tempat-tempat pembalasan serta ganjarannya, dan bila memahaminya dalam arti *mengetahui* maka objeknya adalah balasan dan ganjaran amal itu.

Hadist ini menjelaskan besarnya kasih sayang Allah kepada hambaNya, karena kebaikan yang belum terlaksana telah dinilai disisi Allah sementara keburukan yang belum terlaksana tidak dinilai. Ketentuan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Allah terhadap makhluknya tidak akan menyalahi aturan yang ditetapkan sehingga tidak ada orang yang teraniaya atau dirugikan.

KESIMPULAN

System keuangan pendidikan Islam pada dasarnya memiliki tata kelola sebagaimana pengelolaan keuangan pendidikan lainnya, akan tetapi Islam memiliki coraknya sendiri yang membedakannya dengan system-sistem lainnya, sehingga menjadikannya system keuangan yang layak dijadikan acuan. System keuangan pendidikan terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), personalia (*staffing*), pengkoordinasian, pengelolaan (*actuating*), dan evaluasi/pertanggungjawaban. System keuangan pendidikan Islam terkandung di dalamnya unsur-unsur keislaman yang melekat kuat dalam setiap aktifitas keuangan pendidikan, sebagai contoh pada saat melakukan evaluasi. Islam mengajarkan bahwa apabila penyelewengan keuangan dilakukan oleh salah seorang staf, maka ia harus tau bahwa diluar aktifitasnya ada bagian abstrak yang senantiasa mengontrol aktifitas evaluasi tersebut dalam hal ini malaikat.

Begitu juga dengan pendistribusian, Islam senantiasa mengajarkan bahwa setiap pendistribusian keuangan pendidikan Islam harus benar-benar di distribusikan untuk pihak-pihak yang memang benar-benar membutuhkan dan apabila keuangan pendidikan tersebut memiliki dana yang cukup memadai dan bahkan berlebih maka Islam menganjurkan agar dana tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang mampu bahkan di luar ruang lingkup pendidikan. System keuangan pendidikan Islam juga mengajarkan agar memposisikan orang-orang yang tepat dan jujur dalam mengelola keuangan pendidikan tidak hanya berkompeten secara keilmuan saja akan tetapi juga memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik agar tidak menggunakan dana pendidikan ke arah yang bukan pada tempatnya. Hal utama yang membedakan system keuangan pendidikan Islam dengan system keuangan pendidikan umum lainnya adalah pada saat pertanggungjawaban, bahwa dalam system keuangan pendidikan Islam pertanggungjawaban tidak hanya pada atasan kerja saja akan tetapi juga kepada Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- As- Sirjani Raghieb, 2010, *Rawa'iul Auqaf* (Mesir : Nahdetmisr)
- Al-Jawi Shiddiq, 2007, *Pembiayaan Pendidikan Dalam Islam*, Jurnal House of Khilafah.
- An Nabhani Taqiyuddin, 1990, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, (Beirut : Darul Ummah)
- Ahmad Al-Maraghi Musthafa, 1993, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi* (Semarang : Toha Putra)
- Arifin M, 2009, *Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta : Bumi Aksara)
- Abdus Salam Abdul Wahhab, 2008, *Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Fannu At-Tadris* (Kairo : Dar Al-Salam)
- Dendawijaya Lukman, 2005, *Manajemen Perbankan cet 2* (Bogor : Ghalia Indonesia)
- Echol John, Shadily M, *Kamus Inggris-Indonesia*
- Hasil Penelitian Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan tahun 2006.
- Handoko T. Hani, 2011, *Manajemen*, Edisi II (Yogyakarta : BPFE).
- Ibnu Rusn Abidin, 1998, *Pemikiran Alghazali Tentang Pendidikan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)

- Islahi Abdul Azim, 1992, *Islamic Distributive Scheme : A Concive Statement* (Munich : Personal RePEc Archive)
- M Hudson Barclay, 1979, *Comparison of Current Planning Theories : Counterparts and Contradictions*. APA Journal
- M. Hanafi Muchlis, et. al., 2012, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Kerja da Ketenagakerjaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta : Penerbit Aku Bisa)
- Nata Abuddin, 2005, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta : Gaya Media Pratama)
- Noor Juliansyah, 2013, *Penelitian Ilmu Manajemen, Tinjauan Filosofis dan Praktis* (Jakarta : Kencana).
- Purwanto Agus, 2012, *Nalar Ayat-ayat Semesta*, Cet. 1 (Bandung : Mizan)
- Poerbakawatja Soegarda, 1982, *Ensiklopedi Pendidikan* (Jakarta : Gunung Agung Cet ke 3)
- Quthb Ibrahim Muhammad, 2002, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab, Terjemahan* (Jakarta : Pustaka Azzam).
- Q.S. Ali Imran/3: 130.
- Q.S. Al-Maidah/5: 90.
- Quthb Ibrahim Muhammad, 2002, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khatthab (As-Siyasah Al-Maliyah Li 'Umar bin Khatthab)*, Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Qahaf Mundzir, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif (Al-Waqf Al-Islami Tathawwuruhu Idaratuhu Tanmiyatuhu)*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta : Khalifa)
- Qomar Mujamil, 2007, *Manajemen Pendidikan Islam* (Surabaya : Erlangga)
- Qurthuby, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an* (Cet. Darul Kutub Al-Mishriyah), Jilid 9
- Q.S. Al-Hasyr/59: 18
- Suwiknyo Dwi, 2010, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Taha M. Chabib, 1990, *Teknik-teknik Evaluasi Pendidikan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Tanthowi Jawahir, 1983, *Unsur-unsur Manajemen Menurut Alquran* (Jakarta : Pustaka Al-Husna)

Umiarso Sukarji, 2014, *Manajemen Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta : Mitra Wacana Media)

Winardi J, 2007, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Cet Ke-2 (Jakarta : Kencana)

Yahya, 2003, *Sistem Pembiayaan Pendidikan : Suatu Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Sumatera Barat.* Disertasi, Bandung Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia)

Zallum Abdul Qadim, 1983, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, (Beirut: Darul 'Ilmi lil Malayin)